



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : ASISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERNA PURNAWATI
2. Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 147614

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.968.220.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.550.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.920.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.297.670.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 478.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 263.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 315.529.319

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.761.749.319



III. HUTANG

Rp. 60.085.850

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.701.663.469

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.